

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.39
- Beratha I. Nyoman, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Cet.1, Jakarta, 1982
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Mertokusumo Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara Jakarta, Cet.1, Jakarta, 1981
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011
- Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga Universiti Press, Surabaya, 2016
- Rozaki Abdur dan Sg. Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, IRE Yogyakarta, Desember 2015
- Wardiono Kelik, *Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018
- Widjaja A. W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1996.

### Internet:

- Abdullah Ujang, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 28 Januari 2011, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2019
- Admin, “Yuk Kenali Seluk Beluk Gugatan Perdata”, [www.manplawyers.co](http://www.manplawyers.co), h.1, 02 Agustus 2017, dikunjungi pada tanggal 28 November 2019
- Admin, “Ganti Kerugian Adalah Hak, Tuntutlah Sebanyak Bisa Dibuktikan”, [www.manplawyers.co](http://www.manplawyers.co), 3 Oktober 2017, Dikunjungi pada 29 November 2019

- Artikel DJKN, “Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata”, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 18 Mei 2011, Dikunjungi pada 26 November 2019
- Asshiddiqie Jimly, “Penegakan Hukum”, [www.jimly.com](http://www.jimly.com), h1, 2013, dikunjungi pada 26 November 2019
- Kusnandar Budy Viva, Berapa Jumlah Desa di Indonesia?, [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), 13 Juni 2019, dikunjungi tanggal 24 Agustus 2019
- Salmande Ali, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 28 Januari 2011, dikunjungi pada tanggal 28 November 2019
- Subhkan Imam, Politik Kongkalingkong di Tingkat Desa, Dagelan Pemilihan BPD di Desaku, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 7 November 2018, dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2019
- Redaktur Khusus, Pemilihan BPD Kalaena Ditengarai Sarat Kecurangan, [www.mediadutaonline.com](http://www.mediadutaonline.com), 22 Februari 2019, dikunjungi 1 Agustus 2019
- Pramesti Tri Jata Ayu, “Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 20 Oktober 2014, h.1, dikunjungi pada tanggal 25 November 2019
- Wahyunadi Martono Yodi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia, [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id), ,h.2, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2019

**Jurnal:**

- Firdaus Emilda, ‘Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia’, *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 2, No.1, Agustus 2011
- Hanafi Muhammad, ‘Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia’, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2 2013
- Ismail Hubertus Hasan, ‘Demokratisasi Di Perdesaan Melalui Badan Perwakilan Desa’, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No.1, 2004
- Kusmanto Heri, ‘Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1), 2013
- Napir Suaib, ‘Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo’, *Journal of Government and Political Studies*, Vol.1, No,1, April 2018

Prihatin Panca Setyo, 'Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa', *Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*, Vol 2, No.2, 2016

Rohmawati Tatik, 'Dinamika Politik Perdesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Maisn Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, Vol.01

Wijayanto Dody Eko, 'Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa', *Jurnal Independent*, Vol.2 No.1, 2014

Wirahutama Tegar Trihatmaja dan Agus Prstyawan, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Penyelenggaraan Pemerintah Desa', *Jurnal Mahasiswa*, Vol 3 Nomor 01 Tahun 2016

#### **Media Massa:**

Prasetio Adisuryo, "Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 4 Juli 2011, h.1, dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2019

Redaksi Dinamika Jambi, Pemilihan BPD di Batanghari Disinyalir Tak Transparan, Masyarakat Protes, [www.dinamikajambi.com](http://www.dinamikajambi.com), 4 Mei 2019, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2019

Redaktur Palopopos, Pemilihan Ketua BPD Kalaena Sarat Kecurangan, <https://palopopos.fajar.co.id/2019/02/23/pemilihan-ketua-bpd-kalaena-sarat-kecurangan/>, 22 Februari 2019, dikunjungi 29 Desember 2019

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 004/SKLN-IV/2006, Permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Juli 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 97/ PUU-XI/2013, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 mei 2014

Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR, tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, 23 Agustus 2017

#### **Sumber lainnya:**

- M Frangki Adi Wijaya, “*Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Pemerintahan Desa*”, Skripsi, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015
- Kawamura Koichi, ‘Consensus and Democracy in Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited’, Tesis, Institute of Developing Ecoomies, September 2011
- Ichwanuddin Wawan , *Legislatif Indonesia*, Modul 1, Universitas Terbuka, 2014
- Pusat Penelitian dan Pengembangn Sistem Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016, 9 Desember 2016.